



Sertifikat

No. 0769/SNA-XX/2017

Diberikan kepada :

Wahyudin Nor

Sebagai :

PEMAKALAH

Judul Artikel :

Determinan Pengungkapan Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

20

Seminar Nasional Akuntansi XX

"Harmonisasi Spirit Pandhalungan (Kebhinekaan) Untuk Penguatan Profesionalitas Akuntan Pendidik Menuju Indonesia Jaya"

Diselenggarakan Oleh

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik

Bekerjasama dengan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

(Pada Tanggal 27-29 September 2017 selama 900 menit dengan nilai 18 SKP)

Jember, 29 September 2017

Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, S.E., M.Si., Ak., CA.
Ketua IAI KAPd

SNA No : 00354

**DETERMINAN PENGUNGKAPAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING*
PEMERINTAH DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Full paper

Annisa Haqiki

Universitas Lambung Mangkurat
annisahaqiki@gmail.com

Wahyudin Nor

Universitas Lambung Mangkurat
wahyudinnor@unlam.ac.id

Muhammad Hudaya

Universitas Lambung Mangkurat
mhudaya@gmail.com

Abstract: *The study aims to investigate the influence of Local Leader's Commitment, Own Revenue of local government, General Allocation Fund, Local Government's Age on Internet Financial Reporting by Local Government and also to investigate the influence of IFR on the Quality of Local Financial Statement. From 31 provincial governments in Indonesia during 2013-2015, consist of 93 data. The analysis technique used in this research are logistic regression and ordinal logistic regression. The results show the local leader's commitment and the own revenue have influence on IFR by Local Government. While general allocation fund and Local Government's Age do not have any influence on local government's IFR. In addition, IFR by local government does not have any influence on local financial statements.*

Keywords: *Internet Financial Reporting (IFR), Local Government, Quality, Local Financial Statement*

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini, bidang sektor publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah turut serta mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebagai upaya pemanfaatan teknologi secara optimal, pemerintah daerah melalui e-government melaksanakan pengungkapan atas laporan keuangan di internet (IFR). Penggunaan e-government dengan IFR sebagai media yang efektif, efisien, dan ekonomis, dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi berkaitan dengan pemerintah daerah.

Aturan pengembangan e-government tercantum dalam Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Kewajiban pengungkapan IFR untuk membentuk pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel ditegaskan melalui Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya dijadikan sebagai faktor pendorong bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan IFR. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah melaporkan dan mengungkapkan laporan keuangannya kepada masyarakat sebagai wujud responsibility pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat (Afriansyah & Haryanto, 2013).

Keterbukaan penyampaian informasi antara pemerintah daerah dan pihak eksternal salah satunya terwujud melalui IFR pemerintah daerah. IFR juga sebagai cara pemerintah daerah untuk mengurangi agency problem berupa asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan berusaha memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Patton & Evans, 1987). Pada umumnya pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota telah memiliki situs resmi (website) sebagai cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah lebih rendah dibandingkan pengungkapan informasi nonkeuangan (Trisnawati & Achmad, 2014).

Jumlah pemerintah provinsi yang melakukan e-government sebesar 81,82% dan ada 60,6% menurut Verawaty (2014):

Tabel 1 Hasil Survei *E-Government* Dan *Internet Financial Reporting* Pemerintah Provinsi 2014

No.	Province Profile	E-Government Status	IFR Feature
1	Bali	Online	Available
2	Banten	Online	Available
3	Bengkulu	Error	Not Available
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	Online	Available
5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Online	Available
6	Gorontalo	Online	Available
7	Jambi	Online	Available
8	Jawa Barat	Online	Available

9	Jawa Tengah	Online	Not Available
10	Jawa Timur	Online	Available
11	Kalimantan Barat	Online	Available
12	Kalimantan Selatan	Online	Available
13	Kalimantan Tengah	Online	Available
14	Kalimantan Timur	Online	Available
15	Kepulauan Bangka Belitung	Online	Available
16	Kepulauan Riau	Online	Available
17	Lampung	Online	Not Available
18	Maluku	Online	Not Available
19	Maluku Utara	Error	Not Available
20	Nanggroe Aceh Darussalam	Online	Available
21	Nusa Tenggara Barat	Online	Available
22	Nusa Tenggara Timur	Online	Available
23	Papua	Online	Not Available
24	Papua Barat	Online	Not Available
25	Riau	Online	Available
26	Sulawesi Barat	Online	Not Available
27	Sulawesi Selatan	Error	Not Available
28	Sulawesi Tengah	Online	Not Available
29	Sulawesi Tenggara	Online	Available
30	Sulawesi Utara	Error	Not Available
31	Sumatera Barat	Online	Available
32	Sumatera Selatan	Error	Not Available
33	Sumatera Utara	Error	Not Available

Sumber: Data diolah (Verawaty, 2014)

Setiap pemerintah daerah mempunyai faktor-faktor dan pertimbangan tersendiri untuk melakukan publikasi laporan keuangan melalui website (Trisnawati & Achmad, 2014). Pengungkapan IFR diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya, menurut Mowday (1987) dalam Yeny, Karamoy, dan Poputra (2016), komitmen memiliki arti lebih dari sebatas loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan yang aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada organisasinya. Artinya, dengan komitmen yang dimiliki oleh pimpinan dari suatu daerah sangat berperan penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar mencapai kriteria good governance.

Sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya transparansi pengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah dapat berkomitmen untuk menerapkan penyampaian informasi keuangannya melalui media jaringan internet dan situs resmi pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah.

PAD merupakan pendapatan suatu daerah otonom yang berasal dari potensi yang dimiliki dan dana lainnya suatu daerah yang disahkan berdasarkan undang-undang, serta diperuntukkan dalam peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah otonom. Sebagai bukti bahwa PAD telah dikelola

dengan baik, penting halnya untuk mempertanggungjawabkan PAD pada laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, Semakin besar PAD seharusnya semakin mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya.

Selain pendapatan asli daerah, DAU merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat diperuntukkan untuk pemerintah daerah, dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui Tingkat Ketergantungan suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan memantau pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja atas alokasi dana umum yang telah diberikan. Sehingga, semakin tinggi dana alokasi yang diterima pemerintah daerah maka semakin besar tekanan yang dimiliki untuk mengungkapkan informasi lebih lengkap. DAU menjadi fokus perhatian bagi masyarakat dan pemerintah pusat disebabkan DAU sebagai salah satu pos yang material yang penggunaannya harus diungkapkan secara menyeluruh (Jaya & Sisdyani, 2014). Penelitian Jaya dan Sisdyani (2014), menunjukkan adanya pengaruh dana perimbangan, khususnya DAU terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi.

Tingkat umur pemerintah daerah diduga memiliki pengaruh dalam pengungkapan IFR. Menurut Setyaningrum dan Syafitri (2012), Umur pemerintah daerah terhitung sejak tahun terbentuknya berdasarkan Undang-undang pembentukan daerahnya, lama tidaknya suatu pemerintah daerah akan mempengaruhi jumlah orang-orang yang berkompoten untuk menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar yang berlaku. Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama cenderung memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Daerah (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun sebelumnya. Waliyyani dan Mahmud (2015) menunjukkan bahwa variabel umur berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan ketidakkonsistenan hasil dan sepengetahuan penulis belum adanya penelitian tentang komitmen kepala daerah terhadap IFR pemerintah daerah, membuat peneliti termotivasi meneliti kembali beberapa variabel diantaranya yaitu PAD, DAU, dan umur pemerintah daerah. Sedangkan satu variabel lainnya, yaitu Komitmen Kepala Daerah tergolong variabel baru. Selain mengetahui determinan pengungkapan IFR pemerintah daerah, peneliti juga ingin mengetahui pengaruh antara IFR dengan kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen kepala daerah, PAD, DAU, dan umur pemerintah daerah terhadap IFR Pemerintah Daerah serta untuk mengetahui pengaruh IFR Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan dan Signalling dalam Pemerintahan

Teori keagenan merupakan hubungan yang ada akibat satu pihak (*principal*) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk dapat melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Hilmi dan Martani (2012), pada konteks sektor pemerintahan, pemerintah daerah sebagai *agent* yang diberikan amanat oleh masyarakat selaku *principal* untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat. Pemerintah dalam konteks teori *signalling* akan berusaha memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Patton & Evans, 1987). Teori *signalling* pada pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat yang memiliki keinginan untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat, agar dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini sehingga dapat berjalan dengan baik (Trisnawati & Achmad, 2014).

2.2 *Internet Financial Reporting (IFR) pemerintah daerah*

IFR pemerintah daerah sebagai media yang paling tepat dalam pemenuhan aspek 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis) untuk menyediakan serta menginformasikan laporan keuangan kepada seluruh stakeholders yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analisis ekonomi, investor, kreditor, donatur, dan rakyat (Verawaty, 2015). Berdasarkan Government Finances Officers Association (2009) terdapat beberapa manfaat dengan menggunakan website pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi keuangan yaitu : Meningkatkan kepedulian para pengguna informasi keuangan; Aksesibilitas secara universal bagi seluruh pengguna informasi keuangan; Meningkatkan potensi interaksi dengan pengguna informasi keuangan; Meningkatkan efisiensi melalui penyajian seluruh informasi keuangan pada satu sumber situs resmi; Meminimalisir biaya melalui publikasi elektronik; Berkontribusi pada bagian pembangunan yang berkelanjutan.

2.3 *Kualitas Laporan Keuangan Daerah*

Pemerintah daerah sebagai lingkup dari sektor publik memiliki peranan penting untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Laporan keuangan yang baik atau berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah berindikasi terhadap akuntabilitas dari laporan keuangan (Nugraeni & Budiantara, 2015). Sehingga, dalam upaya mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan dapat tercapai melalui penyajian laporan keuangan yang baik atau berkualitas. Didukung dengan perhatian terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan sangat tinggi. Melalui laporan keuangan pemerintah yang lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan) maka akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut melalui pengauditan oleh BPK, sebelum disampaikan kepada stakeholders dalam rangka mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas keuangan Negara (Nugraeni & Budiantara, 2015). Menurut Mahmudi (2011, p.16), kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor.

2.4 Pengaruh Komitmen Kepala Daerah terhadap IFR

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penting peranan komitmen kepala daerah dalam mengungkapkan hasil kinerja keuangannya yang berupa laporan keuangan di internet sebagai wujud pertanggungjawaban atas sumber pendanaan yang dikelola dan juga sebagai wujud transparansi informasi kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya. Melalui visi, misi, dan strategi kepala daerah selama menjabat dapat dilihat komitmen kepala daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan daerahnya di internet. Upaya diseminasi informasi financial ini dapat membangun kepercayaan masyarakat serta stakeholders lainnya kepada pemerintah, atas wujud konkrit penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014, Undang-undang No. 33 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Komitmen Kepala Daerah berpengaruh terhadap IFR pemerintah daerah

2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap internet IFR pemerintah daerah

Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Semakin besarnya jumlah pendapatan asli daerah suatu pemerintah daerah, maka semakin besar pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pengguna laporan keuangan. Pihak eksternal akan beranggapan bahwa dengan tingginya jumlah PAD yang diperoleh pemerintah daerah maka pengelolaan sumber daya yang ada sudah berjalan dengan baik. Jaya dan Sidyani (2014) menunjukkan adanya pengaruh PAD terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal yang sama pada penelitian Pratama, Sriwerastuti, dan Sujana (2015) adanya pengaruh PAD yang menjadi proksi dari kekayaan daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H2 = Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap IFR pemerintah daerah

2.6 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap IFR pemerintah daerah

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Banyak pemerintah yang masih mengandalkan DAU

karena jumlah PAD yang tidak dapat mencukupi anggaran belanja daerahnya. DAU dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tingginya DAU daerah maka semakin tinggi pula desakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut. Jaya dan Sisdyani (2014) menandakan adanya pengaruh dana perimbangan, khususnya DAU terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. Puspita dan Martani (2010), menyatakan bahwa Tingkat Ketergantungan diproksikan dengan DAU berpengaruh terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan pada website pemerintah daerah.

H3 = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap IFR pemerintah daerah

2.7 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap IFR pemerintah daerah

Umur pemerintah daerah terhitung sejak tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Umur pemerintah daerah yang lebih lama akan memiliki berbagai berpengalaman baik dalam bidang administrasi, serta memiliki orang-orang yang berkompeten lebih dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah akan semakin matang dalam memperbaiki penyajian laporan keuangan pemerintah daerahnya berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangannya oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, semakin lamanya suatu pemerintah daerah beridiri, akan semakin mendorong pemerintah daerah tersebut melaporkan laporan keuangannya di internet. Waliyyani dan Mahmud (2015) menunjukkan bahwa variabel umur berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H4 = Umur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap IFR pemerintah daerah

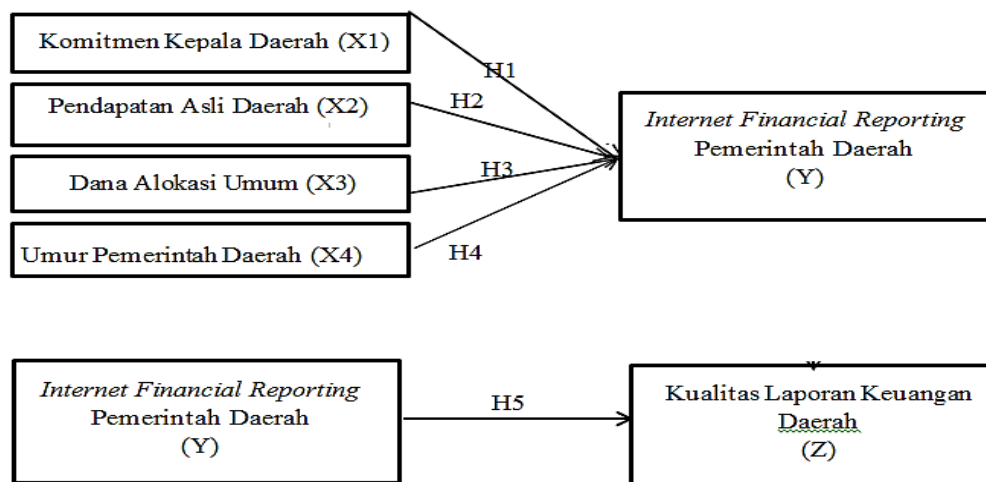
2.8 Pengaruh IFR pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut Mahmudi (2011, p.16), kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor. Perwujudan kualitas laporan keuangan yang baik salah satunya adalah melalui transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan kepada publik. Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan melalui pelaporan keuangan di internet. Sehingga, dengan adanya IFR seharusnya dapat mendorong pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah melalui transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sistem informasi keuangan daerah yang ada. Penelitian Yuliani, Nadirsyah, dan Bakar (2010) menunjukkan bahwa dengan adanya pengaruh dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah. Jaya dan Verawaty (2015), terdapat keterkaitan indeks pengungkapan laporan keuangan yang

disajikan melalui internet antara lain isi, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi, dan user support dengan kualitas laporan keuangan. Rumusan hipotesis penelitian adalah:

H5 = IFR pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Model penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif - asosiatif yang bertujuan mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Objek penelitian pada penelitian ini berupa variabel yang menjadi perhatian dalam topik ini, yakni IFR, komitmen kepala daerah, PAD, DAU, dan umur pemerintah daerah serta kualitas laporan keuangan daerah.

3.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah melalui pengumpulan data arsip atau basis data. Data diperoleh dengan mengakses berbagai website terkait dengan data yang diinginkan oleh peneliti sesuai tujuan penelitian. Adapun pengecualian untuk Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta tidak termasuk ke dalam pengujian penelitian. Hal ini dikarenakan Kalimantan Utara sebagai provinsi yang baru saja dibentuk pada tahun 2014, sedangkan Kalimantan Timur dan DKI Jakarta tidak memperoleh anggaran realisasi untuk DAU pada tahun 2015. Variable IFR pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah diperoleh dengan mengakses situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia. Variabel komitmen kepala daerah diperoleh dari visi misi RPJMD atau RPJPD maupun melalui Laporan-laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah masing-masing provinsi. Data terkait PAD, DAU, diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan BPS

masing-masing provinsi. Sementara, data terkait opini audit BPK diperoleh Indeks Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2016 oleh BPK RI.

3.3 Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu Komitmen Kepala Daerah, PAD, DAU, Umur Pemerintah Daerah, IFR Pemerintah daerah, serta Kualitas laporan keuangan.

Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Pengukuran
IFR pemerintah daerah (Y) Sumbernya dari mana	IFR pemerintah daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah melalui internet atas anggaran yang dikelolanya. Jika pemerintah daerah melaporkan laporan keuangan di internet maka diberi angka "1", apabila tidak melaporkan maka diberi angka "0"
Komitmen Kepala Daerah (Y)	Variabel komitmen kepala daerah ini mengacu kepada kepala daerah yang berkomitmen melakukan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, khususnya pengelolaan anggaran atau keuangan daerah. Variabel ini dapat dilihat melalui visi dan misi RPJMD atau RPJPD jika tidak ditemukan RPJMD atas provinsi tersebut. Selain itu, dapat dilihat melalui pernyataan visi misi daerah yang ada pada beberapa laporan yaitu, Laporan LPPD, LKPJ, maupun ILLPD. Jika pemerintah daerah berkomitmen transparan penyelenggaraan pemerintahan (pengelolaan keuangan) maka diberi angka "1", apabila tidak maka diberi angka "0"
PAD (X2)	PAD merupakan pendapatan daerah otonom sendiri dari potensi yang dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah otonom diukur dengan Ln Total PAD yang terealisasi
DAU (X3)	DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi diukur dengan Ln Total PAD yang terealisasi
Umur Pemerintah Daerah (X4)	Umur pemerintah daerah dihitung sejak tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan UU pembentukan daerah tersebut. 2013-2015 dengan dikurangkan tahun pembentukan daerah sesuai UU pembentukan daerahnya.
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Z)	Pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Menurut Mahmudi (2011, p.16), kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor. Artinya, berkualitasnya sebuah laporan keuangan dapat diproksikan dengan opini audit BPK RI. Kualitas pada penelitian ini diukur melalui opini audit dengan menggunakan skala ordinal yang menunjukkan tingkatan, yaitu: (1) Tidak Memberikan Pendapat (TMP), (2) Tidak Wajar (TW),

	(3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (4) Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), (5) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Fontanella dan Rossieta, 2014; SPKN).
--	--

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data regresi logistik untuk melakukan pengujian pengaruh langsung ke variabel *IFR* pemerintah daerah sebagai variabel dependen merupakan variabel dikotomik. Sedangkan dalam pengujian relevansi antara variabel *IFR* dengan variabel kualitas laporan keuangan daerah menggunakan teknik analisis regresi logistik ordinal. Secara umum, persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

$\ln \frac{p}{1-p}$	= <i>IFR</i> Pemerintah Daerah (Y)
b0	= Konstanta
X1	= Komitmen Kepala daerah
X2	= PAD
X3	= DAU
X4	= Umur Pemerintah Daerah
b1, b2,..	= Koefisien Regresi

Persamaan regresi logistik ordinal adalah sebagai berikut:

$$\text{Logit}(p_1) = \alpha_1 + \beta'Y$$

$$\text{Logit}(p_1 + p_2) = \alpha_1 + \beta'Y$$

$$\text{Logit}(p_1 + p_2 + p_3) = \alpha_1 + \beta'Y$$

$$\text{Logit}(p_1 + p_2 + p_3 + p_4) = \alpha_1 + \beta'Y$$

$$\text{Logit}(p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5) = \alpha_1 + \beta'Y$$

Keterangan:

Logit (p1+... +p5)	= Kualitas Laporan Keuangan Daerah
p1	= Probabilitas Tidak Memberikan Pendapat
p2	= Probabilitas Tidak Wajar
p3	= Probabilitas Wajar Dengan Pengecualian
p4	= Probabilitas Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
p5	= Probabilitas Wajar Tanpa Pengecualian
β'	= Koefisien Regresi
Y	= <i>IFR</i> Pemerintah daerah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data dan Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 93 data yaitu 31 provinsi dikalikan dengan tiga periode pelaporan dari tahun 2013 hingga 2015. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian ditunjukkan oleh tabel 3.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	93	0	1	.57	.498
X1	93	0	1	.68	.470
LnX2	93	25.76	30.42	27.9342	1.12356
LnX3	93	27.15	28.45	27.6573	.28358
X4	93	9	67	46.58	18.877
Z	93	1	5	4.20	1.027
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Data Output Spss (2017)

- a) Variabel IFR pemerintah daerah (Y) pada tahun 2014 sebesar 74.2%, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dibandingkan tahun lainnya. Tahun 2015 merupakan jumlah persentase terendah, hanya sekitar 35.5% yang melakukan IFR pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.55 dan nilai simpangan baku sebesar 0,498.
- b) Variabel Kualitas Laporan keuangan (Z) diketahui tidak ada pemerintah provinsi di Indonesia yang mendapatkan opini tidak wajar atas laporan keuangan keuangan tahun anggaran 2013-2015. Opini Wajar Tanpa Pengecualian memiliki persentase tertinggi yakni 54.9% dan opini dengan persentase terendah adalah opini Tidak Memberikan Pendapat dengan persentase 3.2%. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (mean) 4.20 dan nilai simpangan -1.027 . Nilai maksimum adalah 5 untuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan nilai minimum adalah 1 untuk opini Tidak Memberikan Pendapat.
- c) Variabel komitmen kepala daerah (X1) yang berkomitmen melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan atau penyelenggaraan kinerja pemerintah daerahnya sudah lebih dari 50%, atau tepatnya sebesar 67.74%. Adapun sebesar 32.26% kepala daerah yang tidak berkomitmen. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.68 dan nilai simpangan baku sebesar 0,470.
- d) Variabel PAD (X2) Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2013-2015 memiliki nilai rata-rata (mean) 27.9342 dan nilai simpangan baku (standard deviation) 1.12356. Pemerintah Provinsi yang memiliki LN PAD tertinggi yakni provinsi Jawa Barat sedangkan provinsi dengan LN PAD terendah tahun anggaran 2013 dan 2015 adalah provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2014 adalah provinsi Maluku Utara.

- e) Variabel DAU (X3) Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2013-2015 memiliki nilai rata-rata (mean) 27.6573 dan nilai simpangan baku (standard deviation) 0.28358. Nilai minimum adalah 27.15 dan nilai tertinggi adalah 28.45. Pemerintah Provinsi yang memiliki LN DAU tertinggi tahun anggaran 2013-2015 yakni provinsi Papua sedangkan provinsi dengan LN DAU terendah tahun anggaran 2014 adalah provinsi Kepulauan Riau, serta tahun 2013 dan 2015 adalah Provinsi Banten.
- f) Variabel Umur Pemerintah Daerah (X4) Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2013-2015 memiliki nilai rata-rata (mean) 46.58 dan nilai simpangan baku dan nilai simpangan baku (standard deviation) 18.877. Nilai minimum adalah 9 dan nilai maksimum adalah 67.

4.2 Kelayakan Model Regresi Logistik dan Regresi Logistik Ordinal

Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis regresi logistik dan regresi logistik ordinal adalah menilai kelayakan model regresi. Dari beberapa tahapan untuk menilai kelayakan model seperti, Goodness Of Fit, penurunan nilai -2 Log Likelihood regresi logistik, Omnibus tests, nilai Nagelkerke R Square, nilai -2 Log Likelihood regresi logistik ordinal, output goodness of fit regresi logistik ordinal, pearson dan deviance, nilai signifikansi test of parallel lines, dapat disimpulkan bahwa model regresi fit untuk digunakan. Selain itu, Link Function yang dipilih juga telah sesuai dan tepat.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji regresi logistik yang ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1^a	X1	.984	.495	3.945	1	.047	2.674
	LnX2	.668	.280	5.713	1	.017	1.951
	LnX3	-.373	.945	.156	1	.693	.689
	X4	.011	.016	.447	1	.504	1.011
	Constant	-9.186	26.688	.118	1	.731	.000

Sumber: Data Output SPSS (2017)

- a) Pengaruh komitmen kepala daerah terhadap IFR pemerintah daerah

Koefisien regresi variabel komitmen kepala daerah adalah 0.984 dan tingkat signifikansi variabel pendapatan daerah adalah 0,047 dan lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya, variabel komitmen kepala daerah yang diukur dengan variabel dummy berpengaruh positif terhadap IFR pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar komitmen kepala daerah dapat mendorong keinginan pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet.

Pejabat publik dituntut lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Artinya, penting bagi kepala daerah untuk berkomitmen dalam mengungkapkan laporan keuangan di internet sebagai wujud pertanggungjawaban atas sumber pendanaan telah dikelola. Sejalan dengan penelitian Adha, Rahmawati, dan Azhar (2014) yang menyatakan komitmen kepala pimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pada Teori signalling dapat mengurangi dampak asimetri informasi antara hubungan pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal), dengan cara pemublikasian laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, sebagai upaya memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat dengan baik. Melalui IFR yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat serta stakeholders lainnya kepada pemerintah. Hal ini sebagai wujud konkrit penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah, yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Pengaruh PAD terhadap IFR pemerintah daerah

Koefisien regresi variabel PAD adalah 0.668 dan tingkat signifikansi variabel PAD adalah 0,017, lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya, variabel pendapatan asli daerah yang diukur dengan Logaritma Natural (LN) PAD berpengaruh positif terhadap IFR pemerintah daerah.

PAD sebagai kekayaan yang dihasilkan sendiri oleh daerah menyebabkan penggunaan terhadap PAD menjadi lebih fleksibel jika dibandingkan dengan penggunaan sumber dana lainnya. Pemerintah daerah akan cenderung lebih leluasa dalam penggunaan PAD tersebut dalam proses pembangunan fasilitas infrastruktur guna menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Artinya, adanya potensi realisasi PAD yang besar, maka peluang untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah akan semakin besar pula.

Pemerintah daerah melakukan IFR bertujuan untuk menunjukkan bahwa alokasi penggunaan PAD telah digunakan dengan benar. Selain itu, adanya kaitan hubungan antara pihak agent (pemerintah) dan principal (masyarakat) menuntut adanya pelaporan keuangan yang transparan oleh pemerintah daerah. Sehingga, masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

c) Pengaruh DAU terhadap IFR pemerintah daerah

Koefisien regresi variabel DAU adalah $-0,373$ dan tingkat signifikansi variabel DAU adalah $0,673$, lebih besar dari 5% atau $0,05$. Variabel DAU yang diukur dengan Logaritma Natural (LN) DAU tidak berpengaruh terhadap IFR pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah DAU pemerintah daerah, tidak mendorong keinginan pemerintah daerah untuk melakukan IFR. Hasil ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari variabel DAU adalah $27,6573$ dan standar deviasinya adalah $0,28358$. Hal ini menunjukkan bahwa data DAU sangat bervariasi.

Berdasarkan data, provinsi Banten dengan jumlah peroleh DAU terendah tetap melaporkan laporan keuangannya di internet. Hal ini menunjukkan, IFR merupakan wujud konsistensi pemerintah provinsi Banten dalam upaya mewujudkan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat, serta pada pemerintah pusat atas tingkat ketergantungan provinsi tersebut. Selain provinsi Banten, beberapa provinsi yang turut melakukan IFR meskipun memiliki DAU kecil, seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Gorontalo.

Faktor penyebab IFR tidak dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat melalui komponen penyusun DAU yakni alokasi dasar, berupa gaji pegawai negeri sipil suatu daerah maupun tunjangan kinerja daerah (TKD) yang seharusnya dapat mendorong peningkatan kinerja dari pemerintah tersebut, termasuk dalam hal implementasi IFR dan kualitas laporan keuangan daerahnya. Faktanya dalam penelitian ini, peningkatan jumlah DAU dalam hal peningkatan gaji dan tunjangan pegawai tidak mampu mendorong penerapan IFR di pemerintah daerah di Indonesia. Pelaksanaan IFR sebatas sebagai rasa tanggung jawab pemerintah daerah selaku agen kepada pemerintah pusat maupun masyarakat atas tuntutan transparansi informasi keuangan, serta sebagai upaya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap IFR pemerintah daerah

Koefisien regresi variabel umur pemerintah daerah adalah $0,011$ dan tingkat signifikansi variabel umur pemerintah daerah adalah $0,504$, lebih besar dari 5% atau $0,05$. Artinya, variabel umur pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan tahun tidak berpengaruh terhadap IFR pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan, semakin lama umur pemerintah daerah pemerintah daerah, tidak mendorong keinginan pemerintah daerah untuk melakukan IFR. Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari variabel umur pemerintah daerah adalah $46,58$ dan standar deviasinya adalah $18,877$. sehingga, data umur pemerintah daerah

yang ada sangat bervariasi. Tinggi variasi data dalam penelitian ini menyebabkan hipotesis tidak diterima.

Melalui data penelitian dapat diketahui rentang umur pemerintah daerah cukup besar yaitu antara 9 tahun hingga 67 tahun. Hal ini disebabkan adanya beberapa kali pemekaran daerah di Indonesia sesuai dengan aturan dalam UU No.32 tahun 2004 terkait otonomi daerah yang dituntut agar daerah lebih mandiri serta memiliki otonomi sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak hanya pemerintah daerah yang memiliki umur yang lebih lama yang melakukan pelaporan keuangan di internet, namun ada pemerintah daerah yang tergolong muda telah melakukan IFR. Apabila dilihat dari data umur pemerintah daerah selama tahun 2013-2015, umur provinsi Banten dan provinsi Kepulauan Riau merupakan beberapa provinsi termuda jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Secara berturut-turut provinsi Banten melakukan pelaporan keuangan di internet untuk tahun anggaran 2013-2015. Sedangkan provinsi Kepulauan Riau telah melakukan IFR pada tahun anggaran 2013 dan 2014. Meskipun memiliki umur yang cukup dini, tidak menutup keinginan Provinsi Banten dan Kepulauan Riau dalam melakukan IFR. Sehingga, diduga bahwa kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia masih cenderung tidak melakukan upaya perbaikan sebagai proses pembelajaran dari organisasi pemerintah daerahnya.

IFR yang dilakukan pemerintah daerah tidak ditentukan dengan lamanya usia suatu pemerintah daerah, melainkan tergantung atas keinginan pemerintah daerah tersebut sebagai organisasi untuk belajar memperbaiki kinerja organisasinya atau tidak. Maka tidak menutup kemungkinan jika pemerintah daerah dengan usia relatif muda justru telah menerapkan IFR. Selain itu juga sebagai upaya pemberian signal positif oleh pemerintah daerah, guna meminimalisir penyimpangan informasi yang akan diperoleh oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil uji regresi logistik ordinal pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal
Parameter Estimates**

	Estimate	Std. Error	Wald	Df	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Threshold [Kualitas = 1]	-3.447	.614	31.533	1	.000	-4.650	-2.244

	[Kualitas = 3]	-.990	.291	11.616	1	.001	-1.560	-.421
	[Kualitas = 4]	-.237	.272	.762	1	.383	-.769	.295
Location	[IFR=0]	-.103	.401	.066	1	.797	-.890	.683
	[IFR=1]	0			0			

Link function: Logit.

Sumber: Data Output SPSS (2017)

e) Pengaruh IFR terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah

Adapun koefisien regresi adalah $-0,103$ dan nilai signifikansi variabel kualitas laporan keuangan daerah yang diprosikan dengan opini audit adalah $0,797$, lebih besar dari 5% atau $0,05$. Artinya, variabel IFR pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan atau hipotesis kelima ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan, walaupun telah ada IFR pemerintah daerah dan telah diwajibkan menyampaikan informasi keuangan secara transparan, belum dapat mendorong keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerahnya.

Berdasarkan data yang ada, beberapa provinsi justru telah melakukan IFR, walaupun belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti provinsi Nanggroe aceh Darussalam telah melakukan IFR pada tahun 2013 dan 2014, meskipun hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun tersebut. Disamping provinsi Nanggroe aceh Darussalam, provinsi Banten yang hanya mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP pada tahun 2013 dan 2014, yang akhirnya di tahun 2015 mengalami perbaikan hasil opini audit dengan mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetap konsisten dalam melakukan IFR. Selain itu, provinsi Jawa Timur yang sempat mengalami penurunan hasil opini audit pada tahun 2014 dari WTP-DPP menjadi WDP, juga tetap konsisten melaporkan laporan keuangan di internet.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diduga IFR yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak sepenuhnya berpengaruh positif. Hal ini dikarenakan masih rendahnya *feedback* dari seluruh stakeholders yang ada terhadap performa laporan keuangan daerah. Selanjutnya, Beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan IFR, hanya sebatas untuk memenuhi tuntutan keterbukaan atas informasi keuangan antara keterkaitan agent-principal pada sektor publik. Beberapa pemerintah daerah cenderung belum mematuhi Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2010 yang masih mengambang ketegasan dari pelaksanaan pelaporan keuangan pada media website

ataupun media massa pemerintah daerah. Selain itu, perlu adanya revisi perbaikan aturan yang mengacu langsung terhadap pelaksanaan IFR pemerintah daerah disertai dengan punishment yang tegas.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Tolong diisi...

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W., Rahmawati, V., & Azhar, A. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *JOM FEKON Vol.1 No.2*.
- Afryansyah, R. D., & Haryanto. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting, 1*.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Fadzil, F. H., & Nyoto, H. (2011). Fiscal Decentralization after Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. *World Review of Business Research Vol 1 No, 2 pp 51-70*.
- Government Finance Officers Association. (2009). Retrieved Oktober 18, 2016, from Presenting Official Financial Documents On Your Government's Website: http://www.gfoa.org/sites/default/files/BUDGET_CAAFR_DEBT_CEDCP_CORBA_TIM_PRESENTING_OFFICIAL_FINANCIAL_DOCUMENTS_ON.pdf
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingakt Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasioanl Akuntasni XV. Banjarmasin*.
- Hudoyo, Y. T., & Mahmud, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal, 4*.
- Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Jaya, A. K., & Verawaty. (2015). The Disclosure of IFR of Local Government in Indonesia: A Futher Review of Government Usage of Information Technology to Provide Public Information. *Social Science, Economics International Conference*.
- Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 285-303*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3, 305-360*.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary IFR by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPF.
- Medina, F. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Universitas Indonesia*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraeni, & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Inimplikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*.
- Patton, J., & Evans, J. (1987). Signaling and Monitoring in Public-Sector Accounting. *Journal of Accounting Research, Vol. 25, Studies on Stewardship Uses of Accounting*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- Pratama, K. A., Werastuti, D. N., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Puspita, R., & Martani, D. (2010). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan informasi keuangan dan Non-keuangan website pemerintah daerah. *Konferensi Regional Akuntansi III di Jember*.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Semarang: UPP STIM YKPN.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.9, No.2, 154-170*.
- Silviana. (2012). Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Proceedings ISSN-2252-3936*.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suchman. (1995). Managing legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. . *The Academy of Management Review, 5771 ProQuest Health Management*.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi XVII. Manado*.
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Verawaty. (2014). The Accessibility Determinants of IFR of Local Government: Further Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research Vol. 4. No. 2. July 2014 Issue. Pp. 176-195*.
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas IFR melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan*.
- Waluyani, G. M., & Makhmud, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Keuangan Pemerintah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 4 (2)*.
- Yeny, Karamoy, H., & Poputra, A. T. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal EMBA Vol.4 Hal. 682-694*.
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol.3 No.2 Hal 206-220*.